

**PERMASALAHAN YURIDIS
DALAM PENDAFTARAN/
PERALIHAN HAK ATAS TANAH
SERTA WARIS**

**OLEH :
KN. KUSUMA, SH
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI
DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG**



KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

PENDAFTARAN TANAH

TUJUAN :

- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atastanah;
- Menyediakan informasi kepada pihak lain yg berkepentingan;
- Tertib Administrasi Pertanahan



KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

DASAR HUKUM

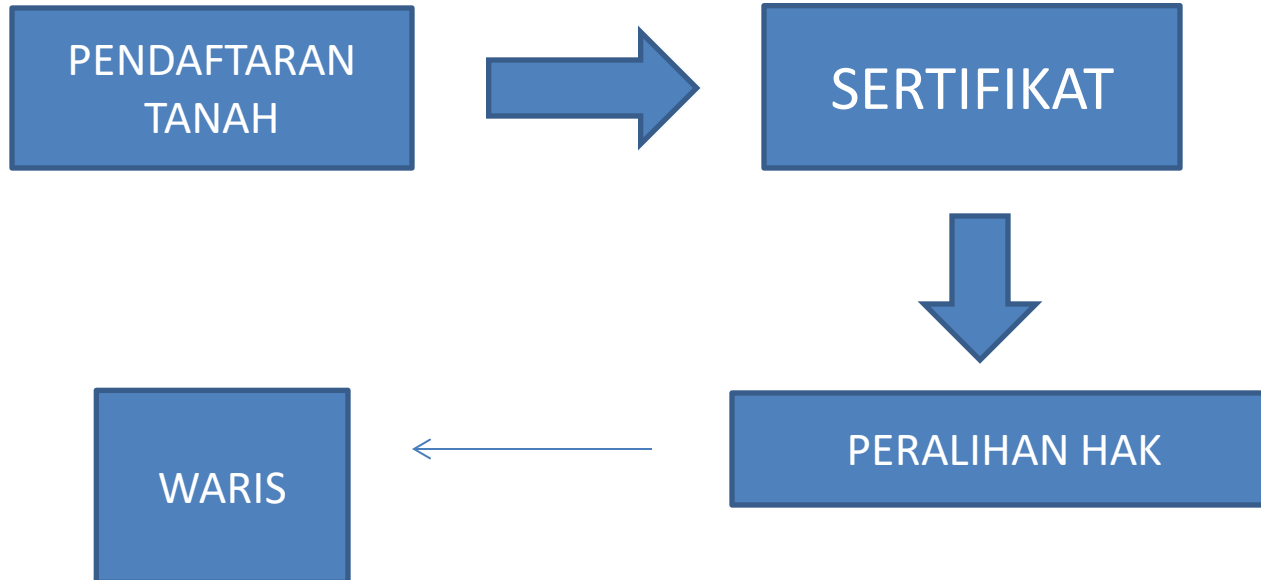
Pasal 19 UUPA

• Untuk Menjamin Kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah



KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

HASIL





KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

PERMASALAHAN YURIDIS

DALAM KEGIATAN

PENDAFTARAN TANAH

PERALIHAN HAK ATAS TANAH

WARIS

DAPAT TERJADI PERMASALAHAN YURIDIS ANTARA LAIN :

- TERJADI TINDAK PIDANA
- TERJADI SENGKETA PERDATA / TUN



KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

DALAM TINDAK PIDANA

- TINDAK PIDANA UMUM (KUHP)
- TINDAK PIDANA KORUPSI
(adanya kerugian negara)



KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

TINDAK PIDANA UMUM

Beberapa ketentuan dalam KUHP :

- Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 (memberikan keterangan palsu)
- Tindak Pidana Penipuan Pasal 378
- Tindak Pidana Penggelapan Pasal 374
- Tindak pidana Penipuan berlatar belakang hak tanah Pasal 385
- Tindak Pidana pengrusakan barang Pasal 406
(rusak batas tanah/patok dll)
- Tindak Pidana Pemasukan paksa ke rumah Pasal 167,168

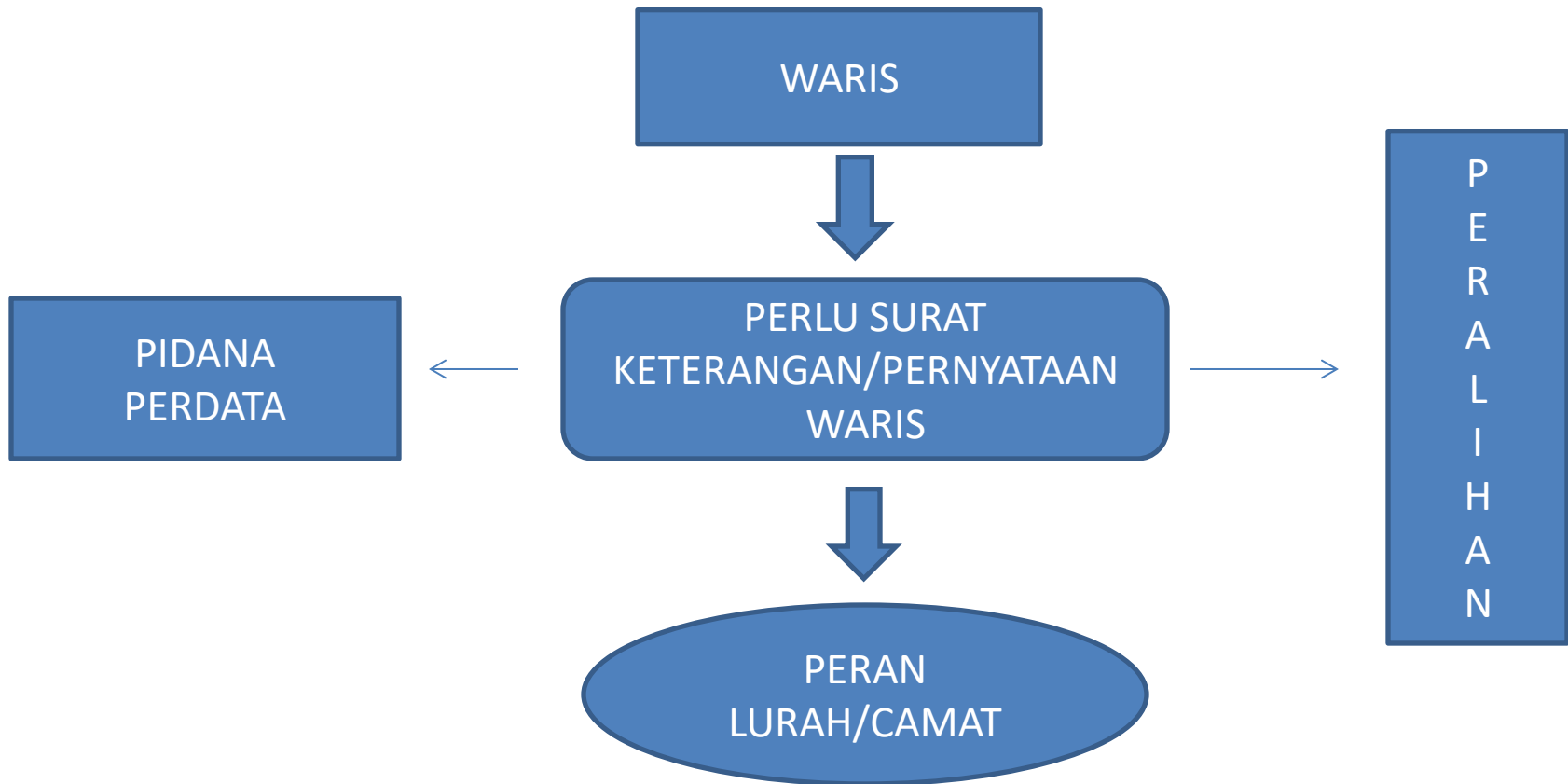


PERMASALAHAN SETELAH PENDAFTARAN TANAH

- Salah satu fenomena yang terjadi dalam permasalahan dibidang tanah adalah masalah sertifikat palsu,
- dari beberapa kasus mengenai sertifikat hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertifikat yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertifikat tidak benar atau dipalsukan.
- Penerbitan suatu sertifikat merupakan suatu proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya surat keterangan Kepala Desa/Lurah/Camat, Keterangan Warisan, segel jual beli dan sebagainya.



PERMASALAHAN SETELAH PENDAFTARAN TANAH

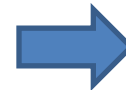




DALAM SENGGKETA PERDATA

- Adanya Perbuatan Melawan Hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan asas-asas hukum. (*onrechtmatigedaad* Pasal 1365 KUH Perdata)
- Adanya Wanprestasi

Adanya Hak yg dilanggar
Adanya ingkar janji



Sengketa/gugatan



KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

SOLUSI

SUPAYA TIDAK TERJADI
PERMASALAHAN HUKUM
DALAM BERTUGAS



AGAR MELAKSANAKAN ASAS UMUM
PEMERINTHAN YG BAIK

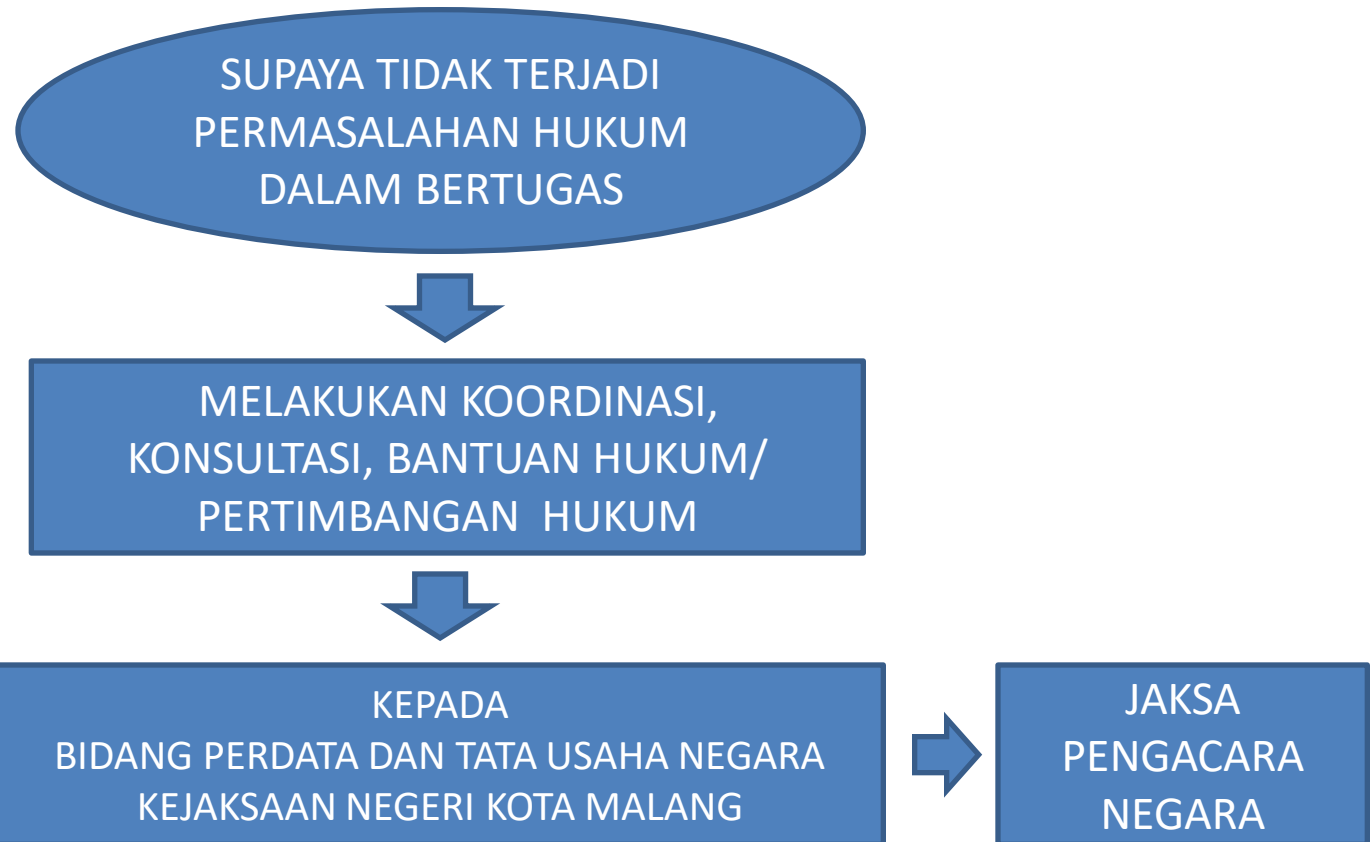


ASAS KECERMATAN
(UU No. 30 thn 2014 tentang Adm. Negara)

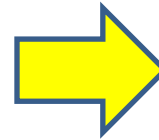


KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

SOLUSI



TUGAS & KEWENANGAN



PENEGAKAN HUKUM

Kepada negara atau pemerintah, meliputi

- lembaga/badan negara,
- lembaga/instansi pemerintah pusat & daerah
- Badan Usaha Milik Negara/Daerah



BANTUAN HUKUM

PERTIMBANGAN HUKUM



untuk menyelamatkan,
memulihkan kekayaan negara,
menegakkan kewibawaan pemerintah

TINDAKAN HUKUM LAIN

kepada masyarakat.



PELAYANAN HUKUM



TERIMA KASIH



**ATAS KEPERCAYAAN
YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI**

